

KLIPING BERITA KETAHANAN PANGAN
1 FEBRUARI 2022

Daftar Isi

Tujuh Daerah Jadi Prioritas Program Penurunan Stunting	2
Turunkan Stunting, Tingkatkan Gizi Masyarakat	3
Implementasi 20 Persen Ketahanan Pangan Ragu Berhasil	4
Harga Sembako Naik, yang Untung Pedagang! Petani Tetap Merana	7
Update Minyak Goreng, Resmi Turun Per Hari Ini Dihimbau Para Produsen untuk Distribusikan	9
Angka Stunting Tinggi, Pemerintah Pusat Akan Lakukan Intervensi Khusus pada Tujuh Daerah ini	10
Babinramil 01 Sikabalu Motivasi Warga Binaan Tingkatkan Ekonomi Dari Pengolahan Sagu	12
Manfaatkan Lahan Sempit, Kodim 0710 Pekalongan Tanam Sayuran Hidroponik	13
Ketahui Pola Konsumsi Masyarakat Untuk Pertimbangan Rumusan Kebijakan, BPS Gelar Survei Biaya Hidup	14
TNI Sulap Lahan Kosong Menjadi Rumah Tanaman Obat Keluarga	15
Dengan Kreasi Olahan ala Milenial Ini, Hasil Pangan Lokal pun Bisa Naik Kelas	16
Mendag Lutfi Ancam Copot Izin Ekspor Jika Produsen Minyak Goreng Tak Penuhi Kebutuhan Domestik!	17
Satgas Pangan Polri Belum Temukan Praktik Penimbunan Minyak Goreng	18
Mengendus Jejak Minyak Goreng Murah yang Langka di Pasaran	19
Harga Minyak Goreng Turun Rp 11.500 per Liter, YLKI Beri Komentar Menohok	21
Hari Ini Berlaku Harga Minyak Goreng Rp 11.500 per Liter, Coba Cek	22

Tujuh Daerah Jadi Prioritas Program Penurunan Stunting

<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602560/tujuh-daerah-jadi-prioritas-program-penurunan-stunting>

Jakarta, InfoPublik - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan intervensi khusus pada provinsi yang angka stuntingnya masih tinggi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan ada tujuh daerah yang angka stunting masih tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalsel, Kalbar, dan Sulawesi Tengah.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN diamanatkan untuk mengurangi kesenjangan angka stunting dengan memberikan intervensi program khusus," kata Kepala BKKBN dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR/RI, Senin (31/1/2022).

Intervensi juga akan dilakukan pada lima daerah yang terbesar jumlah penduduknya, karena secara absolut kasus stuntingnya akan tinggi yaitu; Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara. "Jadi ada 12 daerah prioritas," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, BKKBN telah merampungkan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting (RAN Pasti), antara lain melalui pendekatan keluarga, penyediaan data keluarga berisiko stunting, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia.

"BKKBN membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya. Selain itu ada pendampingan bagi calon pengantin, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting," jelasnya.

Presiden juga memerintahkan agar angka stunting pada 2022 dapat turun tiga persen, dan ditargetkan pada 2024 angkanya menjadi sekitar 14 persen.

"Angka prevalensi stunting pada 2019 sebesar 27,7 persen, menjadi 24,4 persen pada 2021, atau telah turun 3,3 persen," ungkap Hasto.

Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal M. Damanik beberapa waktu lalu menjelaskan, BKKBN telah melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) yang akan ada dalam Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan menjadi pusat gizi serta pelayanan kepada anak stunting.

Dahsat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu.

"Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya/kontribusi dari mitra lainnya, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal," tutupnya. (Sumber BKKBN)

Turunkan Stunting, Tingkatkan Gizi Masyarakat

<https://kaltengtoday.com/turunkan-stunting-tingkatkan-gizi-masyarakat/>

kaltengtoday.com, Pulang Pisau– Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen turut menurunkan angka stunting di Kabupaten [Pulang Pisau](#).

Untuk mewujudkan itu, tahun lalu DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penganjuran dapur sehat atasi stunting (Dahsat) di kampung keluarga berkualitas.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau dr H Bawa Budi Raharja mengungkapkan, program Dahsat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga stunting.

“Yakni keluarga yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai anak stunting di bawah dua tahun atau lima tahun. Terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu,” kata Bawa, Selasa (1/2/2021)

Dia menambahkan, hal itu dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Termasuk bahan pangan lokal yang dipadukan dengan sumber daya dan kontribusi dari mitra lainnya.

Baca Juga : [Program Kerja Kampung KB Pulpis Turunkan Stunting Menggembirakan](#)

“Tujuan dari Dahsat adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi kampung KB di tingkat desa/kelurahan,” ungkap Bawa.

Dia menambahkan, hasil yang diharapkan yakni, terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga risiko stunting. Selanjutnya, diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal.

Baca Juga : [Plt Bupati Pulpis Pimpin Kegiatan Rembuk Stunting](#)

“Terakhir meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui keterlibatannya dalam kelompok usaha keluarga/masyarakat yang berkelanjutan,” tegas Bawa. **[BS]**

Implementasi 20 Persen Ketahanan Pangan Ragu Berhasil

<https://mediaindopos.com/2022/02/01/implementasi-20-persen-ketahanan-pangan-ragu-berhasil/>

Media Indo Pos, Jakarta – Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan teman di sebuah gubuk kecil yang temanya adalah penggunaan dana desa (DD) 20 persen untuk program ketahanan pangan.

Penggunaan dana tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022. Kebijakan yang mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada waktu dua tahun yang lalu, yaitu dasar dari Instruksi Presiden langsung.

Setiap tahun pemerintah desa disuguhi kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang berbeda oleh pemerintah pusat. Tujuannya agar desa di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan dana desa yang baik dalam mendukung menuju desa sejahtera dan mandiri.

Namun semua itu tidak mudah bagi desa untuk mewujudkan harapan tersebut, walaupun selalu diberikan anggaran yang besar setiap tahun oleh pemerintah pusat karena masih terbatasnya sumber daya yang di miliki.

Salah satunya adalah kebijakan 20 persen untuk ketahanan pangan tidak bisa ditawar lagi. Bila dihitung kasar misalkan, pemerintah desa menerima dana desa sebesar 900 juta rupiah dalam satu tahun, maka 20 persennya 180 juta rupiah. Sudah menjadi sebuah konsekuensi pemerintah desa ketika telah menerimanya.

Bukan hanya itu saja, harus memikirkan bagaimana hasil dari program bisa terus berlanjut ketika programnya sudah selesai. Dengan kata lain, kebijakan yang memaksa, pelaksanaan harus tepat, dan ekonomi masyarakat bisa pulih akibat hantaman Pandemi Covid-19 kurang lebih 2 tahun.

Hal tersebut menjadi tanda tanya, baik dari unsur pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, ataupun dari unsur masyarakat desa sebagai penerima outcome perihal bentuk programnya.

Yang jelas, program ketahanan pangan desa yang dimaksud itu tidak seperti bantuan sosial berupa bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat desa pada umumnya. Namun lebih menekankan pada penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Misalnya, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan lain-lain.

Melihat kondisi sekarang, program ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ragu berhasil sesuai yang diharapkan. Bukan maksud tumbuh rasa pesimis, karena melihat belum mendukungnya sumber daya yang kuat, mulai dari pemerintah desa, lembaga desa sampai pada sasarannya.

Justru akan terjadi pemborosan pembiayaan dan mangkraknya hasil program akibat dari belum didukung dengan perencanaan yang matang di tingkat desa sebelum adanya kebijakan.

Di samping itu diperkuat Perpres 104 Tahun 2021 agar direvisi pada pasal penggunaan dana desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI). Tuntutan tersebut dilakukan melalui unjuk rasa menuju ke Jakarta dengan massa yang lebih banyak dari berbagai daerah dengan harapan dapat dikabulkan.

Dari kejadian tersebut sudah jelas bahwa, pemerintah desa sebagai implementasi kebijakan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, tidak mendukung pada perpres tersebut.

Karena akan memberatkan serta telah memenggal kewenangan desa dalam mengatur rumah tangganya (otonomi desa) sesuai kebutuhan desa.

Maka sudah dapat disimpulkan, tidak sejalannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa atas kebijakan serta programnya. Alasannya, pemerintah desa belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut dikhawatirkan anggaran yang akan dipergunakan gagal dalam menyukseskan program karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Sementara pertanggung jawaban berat dibuat dan dilaksanakan. Bukan hanya itu, masih ada yang lebih prioritas daripada program 20 persen, yaitu impian masyarakat menginginkan infrastruktur jalan yang bagus agar selalu lancar dalam beraktifitas sehari-hari baik bagi pedagang, masyarakat luas serta anak-anak sekolah layaknya seperti di kota.

Sebenarnya pemerintah desa sekarang masih perlunya diberikan pembinaan dari pemerintah perihal peningkatan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi kebutuhan dan cara mengelola desanya dengan baik, bukan dipaksa menjalankan program yang belum mampu.

Jika hal tersebut masih saja terus dilakukan apalagi secara berulang-ulang, tidak menutup kemungkinan pemerintah desa akan kaku, dan yang dikhawatirkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dengan cara menghabiskan anggaran.

Pemerintah desa sebenarnya masih fokus pada tuntutan masyarakat desa yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya yaitu infrastruktur. Secara umum, masyarakat desa menilai pemerintah desa dikatakan gagal dalam mengelola pemerintahan jika akses penghubung antar wilayah sulit untuk dilalui.

Pada akhirnya merasakan jenuh, marah atau emosi dengan kondisi itu, lalu diungkapkan melalui media sosial berharap agar ditanggapi dan ditangani oleh pemerintah desa. Cara tersebut tidak elok untuk dilakukan, karena akan berdampak pada kualitas desa menjadi lemah di mata yang lainnya.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah desa sudah rendah membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa seperti jalan poros desa, dan jalan lingkungan desa. Itu disebabkan prioritas penggunaan dana desa yang disalurkan kepada pemerintah desa telah diatur langsung oleh pemerintah pusat untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penanganan pencegahan Covid-19 yang cukup besar.

Saat itu, pemerintah desa mendukung karena keadaan yang sangat genting. Namun berbeda dengan kondisi saat ini, para pekerja yang dulu di rumahkan, para pedagang yang dulu diberhentikan sementara waktu, kini semuanya sudah normal kembali.

Untuk itu bila kebijakan dan program ingin berhasil harus saling mendukung dan memahami prioritas pembangunan desa antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat sebagai pelayan publik.

Dan perlunya harmonisasi untuk saling menguatkan dimulai dengan merumuskan kebijakan bottom-up bukan top-down, sehingga kewenangan desa yang tercantum undang-undang tentang desa tetap kokoh.

Harga Sembako Naik, yang Untung Pedagang! Petani Tetap Merana

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220201085739-4-312000/harga-sembako-naik-yang-untung-pedagang-petani-tetap-merana>

Jakarta, CNBC Indonesia - Bak uang koin, segala sesuatu punya dua sisi. Selalu ada dua versi dari suatu kejadian. Termasuk soal kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data inflasi nasional periode Januari 2022 pada 2 Februari 2022. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia menghasilkan median 0,54% untuk inflasi bulanan (*month-to-month/mtm*).

Sementara inflasi tahunan (*year-on-year/yoy*) diperkirakan 2,16%. Jika terwujud, maka akan menjadi yang tertinggi sejak Mei 2020.

Kemudian inflasi inti secara tahunan diproyeksikan di 1,75%. Kalau ini kejadian, maka adalah yang tertinggi sejak September 2020.

Bank Indonesia (BI) dalam Survei Pemantauan Harga (SPH) hingga pekan IV memperkirakan inflasi Januari sebesar 0,53% mtm. Ini membuat inflasi tahunan menjadi 2,15% yoy.

"Penyumbang utama inflasi Januari 2022 sampai dengan minggu IV yaitu komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebesar 0,12% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,09% (mtm), tomat dan beras masing-masing sebesar 0,05% (mtm), telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,03% (mtm), bawang merah sebesar 0,02% (mtm), cabai rawit, minyak goreng, jeruk, mie kering instan, bawang putih, kangkung, gula pasir dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi yaitu cabai merah sebesar -0,05% (mtm) dan tarif angkutan udara sebesar -0,02% (mtm)," sebut keterangan tertulis BI.

Mengutip catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga daging ayam ras segar di pasar tradisional per 31 Januari 2021 adalah Rp 37.000/kg. Sepanjang bulan lalu, rata-rata harga ada di Rp 38.580,95/kg. Naik 7,36% dari Desember 2021 dan 9,71% dibandingkan Januari 2021.

Kemudian rata-rata harga beras kualitas medium I sepanjang Januari 2022 adalah Rp 11.776,19/kg. Naik 0,78% dibandingkan Desember 2021 tetapi turun ketimbang rerata Januari 2021 yang sebesar Rp 11.812,5/kg.

Update Minyak Goreng, Resmi Turun Per Hari Ini Dihimbau Para Produsen untuk Distribusikan

<https://wartasidoarjo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1813622149/update-minyak-goreng-resmi-turun-per-hari-ini-dihimbau-para-produsen-untuk-distribusikan>

WartaSidoarjo.com - Harga minyak goreng dipasaran yang sempat naik cukup tinggi, per hari ini 1 Februari 2022 akan mengalami penurunan.

Namun, kelangkaan minyak goreng dipasaran masih dikeluhkan oleh masyarakat.

Kepala Satgas Pangan Polri mengadakan konferensi pers di kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, guna menjawab permasalahan tersebut.

Kepala Satgas Pangan Polri Inspektur Jenderal Helmy Santika, mengungkapkan pihaknya telah memberikan himbauan kepada produsen dan pelaku usaha untuk segera mendistribusikan minyak.

Para produsen dan pelaku bisnis harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah pada waktu lalu.

Pihaknya menyampaikan bahwa, produsen dan pelaku bisnis tentang perubahan harga minyak goreng, dari 14.500 ke 11.500 selisihnya akan dibayar oleh pemerintah.

Sampai saat ini belum ditemukan penimbunan minyak goreng oleh produsen maupun pelaku usaha.

Pihaknya pun mengatakan bahwa stok minyak goreng di Indonesia akan aman selama 6 bulan kedepan.

Kepala Satgas Pangan Polri Inspektur Jenderal Helmy Santika, mengatakan "panic buying saya kira tidak ada ya. Hanya saja mungkin ibu ibu yang terbiasa beli 20 liter untuk 1 bulan, belum lagi ibu ibu yang lainnya, sedangkan di retail stok di batasi hanya 1 ton. Sehingga kalau belinya seperti itu stok minyak goreng bisa cepat habis, lalu oleh media dikatakan langka padahal di beli," pungkasnya.***

Angka Stunting Tinggi, Pemerintah Pusat Akan Lakukan Intervensi Khusus pada Tujuh Daerah ini

<https://ngawi.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-2313624540/angka-stunting-tinggi-pemerintah-pusat-akan-lakukan-intervensi-khusus-pada-tujuh-daerah-ini>

JURNAL NGAWI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan intervensi khusus pada provinsi yang angka stuntingnya masih tinggi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan ada tujuh daerah yang angka stunting masih tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalsel, Kalbar, dan Sulawesi Tengah.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN diamanatkan untuk mengurangi kesenjangan angka stunting dengan memberikan intervensi program khusus," kata Kepala BKKBN dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR/RI, Senin (31/1/2022).

Intervensi juga akan dilakukan pada lima daerah yang terbesar jumlah penduduknya, karena secara absolut kasus stuntingnya akan tinggi yaitu; Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara. "Jadi ada 12 daerah prioritas," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, BKKBN telah merampungkan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting (RAN Pasti), antara lain melalui pendekatan keluarga, penyediaan data keluarga berisiko stunting, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia.

"BKKBN membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya. Selain itu ada pendampingan bagi calon pengantin, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting," jelasnya.

Presiden juga memerintahkan agar angka stunting pada 2022 dapat turun tiga persen, dan ditargetkan pada 2024 angkanya menjadi sekitar 14 persen.

"Angka prevalensi stunting pada 2019 sebesar 27,7 persen, menjadi 24,4 persen pada 2021, atau telah turun 3,3 persen," ungkap Hasto.

Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal M. Damanik beberapa waktu lalu menjelaskan, BKKBN telah melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) yang akan ada dalam Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan menjadi pusat gizi serta pelayanan kepada anak stunting.

Dahsat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu.

"Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya/kontribusi dari mitra lainnya, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal," tutupnya.

Babinramil 01 Sikabaluhan Motivasi Warga Binaan Tingkatkan Ekonomi Dari Pengolahan Sagu

<https://minangkabaunews.com/babinramil-01-sikabaluhan-motivasi-warga-binaan-tingkatkan-ekonomi-dari-pengolahan-sagu/?amp>

MINANGKABAUNews.COM, MENTAWAI – Pohon sagu merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di rawa, ataupun di pinggir sungai, sering juga dekat dengan pemukiman tempat tinggal masyarakat.

Melihat potensi yang ada, Babinsa Koramil 01/Sikabaluhan Serka Indra memotivasi masyarakat Desa Srilanggai Kecamatan Siberut Utara Mentawai, memanfaatkan pohon sagu dan mengolahnya menjadi tepung sagu.

Dimana tepung sagu sangat banyak di gemari kalangan masyarakat, dan dapat di jual ke pasar, salah satunya sebagai bahan membuat makanan, atau bisa juga sebagai bahan makanan pokok sehari hari.

Pengolahan sagu antara lain, memilih salah satu batang sagu yang cukup tua kemudian batangnya di kupas, lalu di olah kemudian di peras, seterusnya biarkan mengendap beberapa waktu, setelah mengendap maka sagu di jemur di terik matahari sampai kering, terang Babinsa, Selasa (01/02/2022).

Dengan demikian maka hasil sagu akan memiliki kualitas tinggi, secara otomatis akan memiliki nilai harga ekonomis, selanjutnya dengan penghasilan dari penjualan sagu dapat menunjang perekonomian bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, imbuhnya.

Manfaatkan Lahan Sempit, Kodim 0710 Pekalongan Tanam Sayuran Hidroponik

<https://pantura.tribunnews.com/amp/2022/02/01/manfaatkan-lahan-sempit-kodim-0710-pekalongan-tanam-sayuran-hidroponik>

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Manfaatkan lahan pekarangan yang sempit guna menghasilkan tanaman sayuran yang produktif, Kodim 0710 Pekalongan mengembangkan budidaya tanaman sayuran dengan metode hidroponik.

Adapun jenis sayuran yang ditanam bermacam-macam mulai dari sawi, kubis, bayam, kangkung, selada, dan lain-lain disesuaikan dengan media tanam yang ada.

Kasdim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Raji mengatakan, bahwa penanaman sayuran dengan metode hidroponik ini, selain untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit agar mempunyai manfaat dan untuk memberikan contoh kepada para keluarga prajurit dan masyarakat.

"Pemanfaatan lahan dengan tanaman hidroponik ini sebenarnya sudah lama kita budidayakan, dan seluruh jajaran koramil dibawah Kodim 0710 Pekalongan juga sudah praktek langsung di lapangan. Tujuannya jelas, selain memperindah lingkungan juga hasilnya sangat bermanfaat bagi prajurit dalam memenuhi kebutuhan sayuran," kata Kasdim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Raji, Selasa (1/2/2022).

Pihaknya mengungkapkan, hasil tanaman hidroponik terbukti lebih sehat, karena tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia, cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas.

Tidak hanya itu juga, tanaman hidroponik ini tidak memerlukan pot besar atau tanah yang luas.

"Kandungan gizinya juga lebih tinggi, karena tidak menggunakan pestisida dan hasilnya bisa dipanen kapan saja karena mudah diambil," ungkapnya.

Kasdim berharap, dengan budidaya tanaman hidroponik yang saat ini sudah dilakukan oleh Kodim 0710 Pekalongan berserta seluruh jajaran koramil, diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan sempit yang bisa menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis guna membantu perekonomian keluarga serta masyarakat lingkungannya. (*)

Ketahui Pola Konsumsi Masyarakat Untuk Pertimbangan Rumusan Kebijakan, BPS Gelar Survei Biaya Hidup

<https://pidjar.com/ketahui-pola-konsumsi-masyarakat-untuk-pertimbangan-rumusan-kebijakan-bps-gelar-survei-biaya-hidup/41956/>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul akan menggelar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 ini. SBH sendiri dilangsungkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat. Sehingga kemudian, bisa diketahui biaya hidup masyarakat dalam setiap bulannya. Hasil dari survei ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah.

Kepala BPS Provinsi DIY, Sugeng Arianto mengatakan, SBH ini digelar di beberapa daerah. Untuk Gunungkidul sendiri, program tersebut memang baru pertama kalinya dilakukan. Selama ini, yang dikaji hanyalah angka pengeluaran masyarakat untuk menghitung garis kemiskinan. Padahal, ada banyak sekali indikator yang akan dilihat dan nantinya dikaji oleh petugas.

“Survei ini nantinya akan menjadi dasar penghitungan indeks harga konsumen yang berujung pada inflasi,” kata Sugeng, beberapa waktu lalu.

Hasil dari SBH ini juga akan menjadi dasar pemangku kebijakan pemerintah daerah terkait sejumlah hal. Baik konsumsi pangan dan lainnya.

“Dengan data yang lebih komprehensif, kita berharap nantinya kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih efektif dan tentunya tepat sasaran,” lanjut dia.

Secara teknis, Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Rintang Awan Eltribakti, menjelaskan, dalam survei yang dilakukan selama 1 tahun ini, ada 1.600 Kepala Keluarga (KK) di Gunungkidul yang akan menjadi responden. Mereka dipilih secara acak oleh petugas untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan.

“Tidak survei door to door. Nanti responen ini akan diberi sebuah buku yang wajib diisi setiap hari berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran dan belanja mereka. Belanja yang dimaksud meliputi permakaman, listrik, air dan lainnya,” papar Eltri. “Waktunya 1 tahun dan sudah mulai Januari 2022 ini,” imbuhnya.

Setiap bulannya petugas akan mengecek pengisian lembar kuisioner tersebut dan melakukan evaluasi. Total, ada 800 item komoditas yang didata untuk melihat bagaimana pola konsumsi selama ini.

“Masyarakat di sini banyak yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, memiliki ternak. Itu nanti juga menjadi bahan survei dan bahan bahasan kami,” tutupnya.

TNI Sulap Lahan Kosong Menjadi Rumah Tanaman Obat Keluarga

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/02/01/tni-sulap-lahan-kosong-menjadi-rumah-tanaman-obat-keluarga>

“Selain menambah nilai kebersihan dan keindahan, nantinya rumah Toga ini akan memberi manfaat bagi kita,” ungkapnya.

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINNEWS.COM, REDELONG - Personel TNI dari Koramil 05/Permata Kodim 0119/BM menyulap lahan kosong menjadi rumah tanaman obat keluarga (Toga), di Makoramil setempat.

“Kita memanfaatkan lahan tidur untuk dikelola agar menjadi lahan yang produktif di atas lahan milik TNI AD Kodim 0119/BM,” ujar Komandan Kodim 0119/BM melalui Bati Tuud Peltu Edi Arianto dalam keterangan resmi kepada *Serambinews.com*, Selasa (1/2/2022).

Menurutnya, lahan kosong ini nantinya akan ditanami jagung dan rumah Toga hingga sayur mayur.

“Selain menambah nilai kebersihan dan keindahan, nantinya rumah Toga ini akan memberi manfaat bagi kita,” ungkapnya.

Seperti diketahui, taman Toga pada dasarnya tidak butuh lahan yang luas, bisa dilakukan di pekarangan rumah, maupun kebun yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat.

“Taman Toga ini nantinya, sangat efektif dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan obat tradisional,” tutupnya. (*)

Dengan Kreasi Olahan ala Milenial Ini, Hasil Pangan Lokal pun Bisa Naik Kelas

<https://www.kompasiana.com/mediacendekia1186/61f94c76bb4486631e185722/dengan-kreasi-olahan-ala-milenial-ini-hasil-pangan-lokal-pun-bisa-naik-kelas>

NILAI JUAL hasil produksi pangan lokal bakal lebih terangkat dari meningkatnya konsumsi aneka pangan olahan. Dengan kreasi olahan lebih cantik dan beragam ala milenial, bahan pangan pertanian lokal akan punya harga jual tinggi.

Kini, banyak bermunculan ide-ide kreatif pengolahan bahan pangan lokal oleh milenial. Dengan ide kreasi pangan olahan ini, potensi perekonomian lokal juga semakin digali. Apalagi, sektor pertanian masih belum banyak dilirik konsumen, jika hanya mengandalkan hasil produksi mentahnya.

Ide dan kreasi pangan olahan ini seperti yang dilakukan pelajar dari SMKN 1 Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah resep produk olahan pangan mereka telah diakui punya keunggulan dan bernilai jual jika dipasarkan, sehingga terbuka prospek menjadi alternatif bisnis kuliner. Apa saja itu?

Bahan pangan lokal ubi ungu, merupakan salah satu pangan pertanian khas dan banyak dihasilkan petani di desa-desa yang ada di Kabupaten Malang.

Ubi ungu ini lalu dijadikan produk Donbiu, yang merupakan kue donat yang dikreasi dengan cantik. Kreasi produk ini didasari oleh kue donat itu sendiri, sebagai jajanan yang digemari masyarakat luas dan dinilai cocok untuk cita rasa banyak konsumen.

Ada lagi, kudapan kue tiwul ayu dan pastel ulir, yang dibuat dari bahan buah sukun. Sesuai namanya, bentuk kue dibuat secantik mungkin dengan tambahan warna-warni untuk pemanis.

Kue-kue cantik diberi kemasan unik, dalam wadah kotak kecil dari anyaman bambu. Bentuk kemasannya juga kekinian, seperti bingkisan kado kecil seperti hadiah ultah atau souvenir pernikahan.

Mendag Lutfi Ancam Copot Izin Ekspor Jika Produsen Minyak Goreng Tak Penuhi Kebutuhan Domestik!

<https://www.kompas.tv/article/257333/mendag-lutfi-ancam-copot-izin-ekspor-jika-produsen-minyak-goreng-tak-penuhi-kebutuhan-domestik>

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejauh mana dampak kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang diberlakukan pemerintah pada para pengusaha kelapa sawit untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri?

Terbatasnya stok minyak goreng murah juga dikeluhkan para pembeli; alhasil, mereka terpaksa mereka membeli minyak goreng dengan harga mahal.

Benarkah ada praktik kartel dan monopoli dalam yang memengaruhi harga dan ketersediaan minyak goreng, hingga begitu sulit dikendalikan pemerintah?

Lantas, sejauh ini, bagaimana dampak kebijakan DMO-DPO pada para petani sawit?

Bagaimana solusi untuk mengakali melonjaknya harga CPO di dunia?

Bagaimana hasil upaya menekan harga minyak goreng curah dan kemasan di pasaran saat ini?

Benarkah harga minyak goreng kemasan di Indonesia masih bergantung kebijakan Malaysia menetapkan harga CPO?

Kompas TV bahas bersama Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan Gulat Manurung selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.

Satgas Pangan Polri Belum Temukan Praktik Penimbunan Minyak Goreng

<https://news.detik.com/berita/d-5923278/satgas-pangan-polri-belum-temukan-praktik-penimbunan-minyak-goreng>.

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk minyak goreng kemasan premium, sederhana, dan curah per liter-nya. Hingga saat ini, Polri belum menemukan adanya praktik penimbunan.

"Saya katakan belum (ada penimbunan), tim kami terus bergerak, di Jabar, Jateng, khususnya di Jawa sudah bergerak," ujar Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Irjen Helmy Santika kepada wartawan, Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022).

Helmy menjelaskan HET minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000, kemudian HET kemasan sederhana Rp 13.500, lalu HET minyak goreng curah sebesar Rp 11.500. Dia mengatakan skema tiga harga tersebut berlaku Selasa (2/1).

"Jadi untuk kebijakan minyak goreng satu harga HET Rp 14 ribu ini untuk kemasan premium ini sudah harus masuk ke semuanya. Tanggal 1 Februari besok jadi harus sudah masuk ke semua," ujarnya.

"Pertama Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium, yang kedua kemasan sederhana 13.500 per liter, dan curah 11.500 per liter," ucapnya.

Kemudian, Helmy menyebut tidak ditemukan adanya aksi memborong berlebihan atau panic buying. Dia mengatakan minyak goreng yang habis di beberapa toko bukan karena langka melainkan habis terjual.

"Kalau bicara panic buying menurut saya panic buying itu tidak ada hanya para ibu-ibu mungkin biasanya setok beli 5 liter untuk seminggu, dia beli buat satu bulan berarti dia beli 20 liter sementara di ritel itu juga sudah dibatasi stoknya misalkan dia 1 ton itu kalau ada satu ibu-ibu," katanya.

"Kalau ibu-ibu yang sebelah belanja begitu juga maka habis. Begitu habis maka diberitakan langka padahal tidak," lanjutnya.

Selain itu, Helmy mengatakan satgas pangan Polri masih tetap bekerja. Satgas pangan sebut Helmy, masih melakukan pengecekan untuk memastikan harga minyak goreng dijual sesuai HET.

"Dari satgas pangan Polri sampai ke seluruh jajaran di wilayah kita sudah memberikan arahan untuk dapat melakukan pemesanan, kemudian juga pengecekan ke yang pertama adalah retail modern, kemudian ke pasar tradisional," ucapnya.

Mengendus Jejak Minyak Goreng Murah yang Langka di Pasaran

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202062243-92-753848/mengendus-jejak-minyak-goreng-murah-yang-langka-di-pasaran>.

Jakarta, CNN Indonesia -- Persoalan minyak goreng semakin membuat emak-emak geram. Kemarin soal harga, sekarang masalah stok.

Karima Amalia salah satunya. Ibu dua anak ini mengaku kesulitan 'setengah mati' mencari minyak goreng setelah harga turun menjadi Rp14 ribu per liter pada Rabu (19/1).

"Kemarin sudah jauh-jauh ke Super Indo, ke pasar pada habis. Padahal sudah dibatasi per orang hanya boleh beli dua kemasan," cerita Karima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/2).

Ia akhirnya baru mendapatkan minyak goreng setelah rela 'nongkrong' dari pagi di Alfamart. Ibu rumah tangga yang baru pindah ke Pekalongan ini merasa heran minyak goreng tiba-tiba menjadi barang langka.

"Tadi pagi (Selasa) Alhamdulillah masih dapat. Tapi kalau siangan dikit pasti abis juga," ucap Karima.

Ini hanya satu dari ratusan perjuangan emak-emak lain mendapatkan minyak goreng beberapa hari terakhir.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, stok minyak goreng kosong di sejumlah ritel modern yang berada di Medan, Jakarta hingga Surabaya.

Lihat Juga :

Kemendag Akan Cabut Izin Usaha Penjual Minyak Goreng Mahal
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan terjadi panik beli alias panic buying minyak goreng sejak pemerintah menetapkan harga Rp14 ribu per liter di pasar ritel modern.

"Dari laporan di masyarakat tersebut memang ada serbuan pembelian di beberapa minimarket karena panic buying," ucap Isy beberapa waktu lalu.

Serbuan pembelian tersebut, kata Isy, tak sebanding dengan kapasitas minyak goreng yang tersedia di minimarket. Alhasil, stok di minimarket seringkali langsung ludes ketika barang datang dari gudang.

Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan memastikan minyak goreng mulai terisi kembali di sejumlah ritel modern. Menurutnya, ritel modern sudah banyak melakukan purchase order (PO).

"(Minyak goreng) sudah mulai terisi, PO sudah mulai banyak dan delivery order (DO) sudah mulai delivered," kata Oke.

Oke mengakui salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran lantaran proses

delivery order yang lambat.

"Intinya DO nya yang lambat," imbuh Oke.

Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah ini menjadi kesalahan distributor atau memang kendala teknis di lapangan, dan apakah ada indikasi 'permainan' oleh salah satu pihak di balik kelangkaan minyak goreng.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi mengendus penyelewengan terkait pasokan minyak goreng di ritel modern. Namun, ia tak menyebut secara pasti pihak mana yang melakukan hal tersebut, apakah produsen atau ritel.

"Ada indikasi menahan pasokan, ini sekarang sedang diinvestigasi, kalau terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli," ucap Ukay.

Menurut Ukay, pihak yang melakukan 'permainan' tersebut mengatur produksi dan pemasaran minyak goreng. Dengan demikian, jumlah pasokan berkurang.

"Tapi itu baru indikasi, sedang diinvestigasi, kalau ditemukan bukti akan dibawa ke persidangan KPPU," jelas Ukay.

Berdasarkan pantauan KPPU, sejauh ini stok minyak goreng kosong di sejumlah ritel yang berada di Medan, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

"Ketika harga Rp14 ribu seluruh kantor wilayah KPPU di Medan, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar memantau di ritel modern, hasilnya stok kosong. Begitu ada produk langsung diserbu pembeli," ucap Ukay.

Sementara, Kepala Satgas Pangan Polri Helmy Santika mengaku belum menemukan indikasi penimbunan di tengah kekosongan stok minyak goreng.

"Saat ini masih belum ditemukan ada penimbunan dengan tujuan mengambil keuntungan yang tinggi," ujar Helmy.

Harga Minyak Goreng Turun Rp 11.500 per Liter, YLKI Beri Komentar Menohok

<https://www.suara.com/bisnis/2022/02/01/164314/harga-minyak-goreng-turun-rp-11500-per-liter-ylki-beri-komentar-menohok>

Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang di pasar maupun agen bahan pokok, sebelum menerapkan harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) baru pada **minyak goreng**.

Hal ini agar pelaku usaha bisa mempersiapkan segala hal mulai dari pasokan minyak goreng hingga harga yang akan dijual ke masyarakat dengan patokan HET tersebut.

"Pemerintah cukup menetapkan margin profit yang rasional misalkan 10% dan melarang tindakan extensive margin. Jangan menetapkan HPP 'harga pemaksaan pemerintah' tapi implementasi kedodoran," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi, Selasa (1/2/2022).

Pemerintah, lanjut dia, juga harus tegas kepada produsen minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) untuk menggelontorkan pasokannya ke dalam negeri. Begitu juga, pedagang pasar yang harus disanksi tegas jika kedapatan menimbun pasokan minyak goreng.

"Kalau bisa, beri sanksi dan tegas terhadap pelanggaran, cabut izin ekspor usahanya," ucap Tulus.

Namun demikian, Tulus menyetujui pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang HET pada minyak goreng. Akan tetapi, tambahnya, pemerintah harus menguak keanehan yang terjadi dalam struktur pasar minyak goreng.

"Pemerintah jangan alergi menguak anomali pada struktur pasar minyak goreng intervensi harga akan nihil jika struktur pasar terdistorsi," imbuh dia.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) pada produk Minyak Goreng mulai 1 Februari 2022. Saat ini, HET untuk minyak goreng curah yang paling murah sebesar Rp 11.500 per liter.

Namun, murahanya **harga minyak goreng** ini tidak diimbangi dengan pasokannya. Pasalnya, beberapa warung-warung kelontong maupun agen tidak memiliki pasokan minyak goreng jenis curah.

Hari Ini Berlaku Harga Minyak Goreng Rp 11.500 per Liter, Coba Cek

<https://www.suara.com/bisnis/2022/02/01/093519/hari-ini-berlaku-harga-minyak-goreng-rp-11500-per-liter-coba-cek>

Suara.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai hari ini, Selasa (1/2/2022) memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru untuk produk **minyak goreng**.

Dengan begitu, mulai hari ini **harga minyak goreng** kemasan satu harga Rp 14.000 per liter sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta masyarakat tidak perlu panic buying dalam membeli minyak goreng. Karena, Mendag menjamin pasokan minyak goreng tersedia.

"Masyarakat kami himbau bijak dan tidak panic buying. Kami menjamin stok minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau," ujar Lutfi beberapa waktu lalu.

Mendag juga mengingatkan, kepada pelaku usaha untuk tidak coba-coba bermain-main dengan stok dan harga minyak goreng. Peralnya, jika melanggar pemerintah tidak ambil diam untuk mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha.

"Kami harap harga minyak goreng bisa lebih stabil serta untungkan pedagang distributor dan produsen," ucap dia.

Adapun HET minyak goreng dikategorikan ke beberapa bentuk yang diantaranya:

1. Minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter,
2. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter
3. Minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.